IMPLEMENTASI PROGRAM BPNT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PRA-SEJAHTERA DI DESA SUNGAI LANGKA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

FILDA OCTOVANNY

(181302011)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BPNT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PRA-SEJAHTERA DI DESA SUNGAI LANGKA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

FILDA OCTOVANNY

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan program pemerintah yang diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. fenomena program bantuan bantuan non tunai e-warong yang di laksanakan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran . Program e-warung ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu guna memenuhi kebutuhan pangan mereka yang berdampak pada kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Sungai Langka. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementassi program BPNT terhadap upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Langka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis efektivitas program e-Warung terhadap upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui efektivitas program e-Warung terhadap upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Langka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa efektivitas program bantuan non tunai e-warung terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Langka dapat penyaluran program e-warung harus sesuai dengan 6 T keberhasilan program yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat administrasi dan program e-warong telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Langka dalam pemenuhan kebutuhan pangan, gizi dan protein. Dari hasil penelitian adanya program BPNT sudah membantu KPM akan tetapi belum dapat dikatakan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta terdapat kendala kurang tepat sasaran.

Kata kunci: Program bantuan pangan non tunai, E-Warung, Keluarga pra-sejahtera, Kesejahteraan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE NON-CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAM (BPNT) ON IMPROVING THE WELFARE OF PRE-PROSPEROUS FAMILIES IN SUNGAI LANGKA VILLAGE, GEDONG TATAAN DISTRICT, PESAWARAN REGENCY

By

FILDA OCTOVANNY

This research is motivated by a government program aimed at improving public welfare. It explores the phenomenon of the non-cash food assistance (BPNT) program implemented through the e-Warong system for beneficiary families (KPM) in Sungai Langka Village, Gedong Tataan District, Pesawaran Regency. The e-Warong program targets underprivileged communities to help meet their food needs, which in turn affects the welfare of families in the village. The problem formulation in this research is how the implementation of the BPNT program contributes to efforts to improve community welfare in Sungai Langka Village. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the e-Warong program in improving community welfare and to determine the extent to which it has contributed to welfare improvement in Sungai Langka Village.

This is a qualitative study using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. Based on the findings, it can be concluded that the effectiveness of the e-Warong non-cash food assistance program in efforts to improve community welfare depends on fulfilling the six success criteria: accurate targeting, fair pricing, appropriate quantity, proper quality, timely delivery, and correct administration. The e-Warong program has contributed to the improvement of welfare among the people of Sungai Langka Village, particularly in meeting food, nutritional, and protein needs. However, the research also found that although the BPNT program has provided support to beneficiary families, it has not yet significantly improved overall family welfare, and issues such as mistargeting still exist.

Keywords: ***Non-Cash Food Assistance Program, E-Warong, Pre-Prosperous Families, Welfare***

IMPLEMENTASI PROGRAM BPNT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PRA-SEJAHTERA DI DESA SUNGAI LANGKA KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

FILDA OCTOVANNY

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada
Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN **
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

Judul Skripsi	:	**IMPLEMENTASI PROGRAM BPNT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PRA-SEJAHTERA DI DESA SUNGAI LANGKA KECAATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN**
Nama Mahasiswa	:	Filda Octovanny
NPM	:	**1813032011**
Program Studi	:	**Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Jurusan	:	**Pendidikan IPS**
Fakultas	:	**Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.	**Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.**
NIP 197911172005011002	NIP 231304830505101

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Ketua Program Studi Pendidikan PKn
Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.	**Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.**
NIP 19741108 200501 1 003	NIP 19870602 200812 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.** .....

Sekretaris : **Abdul Halim, S.Pd., M.Pd.** .....

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Yunisca Nurmalisa, M.Pd.** .....

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Albert Maydiantoro, M. Pd.
NIP 198705042014041001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama	:	Filda Octovanny
NPM	:	1813032011
Program Studi	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	:	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas	:	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat	:	Dusun 4, Desa Sungai Langka , RT/RW 002/001, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atauditerbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025

Filda Octovanny
NPM. 1813032011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Sungai Langka, pada tanggal 13 Oktober 2013. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Suwarno dan Ibu Siti Nurjanah.

Pendidikan Formal yang pernah ditempuh antara lain:

1. 2005-2006 TK Dharma Wanita Sungai Langka
2. 2006-2012 SDN 2 Sungai Langka
3. 2012-2015 SMP Negeri 1 Sungai Langka
4. 2015-2028 SMA Negeri 1 Gadingrejo

Pada tahun 2018 penulis diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi). Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sungai Langka , Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sekaligus Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA Negri 2 Gedong Tataan.

MOTTO

Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan
(Al-Insyirah ayat 5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT
atas segala kemudahan, limpahan Rahmat dan karunia-Nya, kupersembahkan
karya ini sebagai tanda bakti
dan kecintaanku kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Suwarno dan Ibu siti Nurjanah yang sangat aku sayangi dan cintai. Terima kasih yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang penuh, mendidik, memfasilitasi yang terbaik dan memberikan dukungan dan semangat bahkan melakukan pengorbanan yang tiada ternilai harganya untuk diriku beserta keberhasilanku. Tentu aku tidak akan bisa membalas semua yang telah kalian berikan, tetapi aku akan selalu berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik untuk kalian. Kepada Allah SWT aku memohon berikanlah kesehatan, umur panjag, agar aku bisa membahagiakan mereka kelak.
Serta

Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, kasih sayang dan kemurahannya yang tidak pernah putus sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Program BPNT Terhadap Kesejahteraan Keluarga Pra-sejahtera di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran" ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, dukungan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Albert Maydiantoro, S.Pd., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M. Pd., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
3. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahun Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, sekaligus dosen pembahas 1, terima kasih atas saran dan masukan dalam penulisan skripsi.

6. Bapak Dr. M. Mona Adha, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang telah memberi masukan dan saran dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing 2 yang telah memberi masukan dan saran serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Febra Anjar kusuma, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembahas 2 yang telah memberi masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini
9. Seluruh Dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Lampung
10. Bapak Erwan Sukijo, selaku Kepala Desa Sungai Langka yang telah memberikan izin kepeda penulis untuk melakukan penelitian
11. Terimakasih untuk keluargaku terkasih kedua orangtuaku tercinta, ayah saya Suwarno, Ibu saya Siti Nurjanah, Kakak saya Jenny Tiara Wulandari, serta Adik saya Ilham Bachtiar Lutfi
12. Terimakasih untuk Larasati Handayani, Sovia Gusviranti, Fadhila Meika Putri telah mendengarkan keluh kesahku dalam penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuanganku di Program Studi PPKn angkatan 2018 terima kasih untuk arahan, nasihat, serta kerja sama selama berjuang di PPKn.
14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan, bimbingan, dan dorongan yang diberikan kepada penulis mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Bandar Lampung, Juli 2025

Filda Octovanny
NPM 1813032011

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
COVER DALAM ..... **iv**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **v**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **vi**
PERNYATAAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
MOTTO ..... **ix**
PERSEMBAHAN ..... **x**
SANWACANA ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Fokus Penelitian 7
1.3 Rumusan Masalah 7
1.4 Tujuan Penelitian 8
1.5 Manfaat Penelitian 8
1.6 Ruang Lingkup Penelitian 9
1.7 Definisi Istilah 9

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Deskripsi Teoritis 11
A. Tinjauan Umum Kebijakan Publik 11
1. Pengertian Kebijakan Publik 11
2. Bentuk- Bentuk Kebijakan Publik 12
3. Jenis Kebijakan Publik 12
4. Tujuan kebijakan Publik 13
B. Tinjauan Umum Implementasi 14
1. Pengertian Implementasi 14
2. Proses Implementasi 15
3. Implementasi Kebijakan 15
C. Tinjauan Umum Bantuan Sosial 18
1. Pengertian Bantuan Sosial 18
2. Kriteria dan Sifat Bantuan Sosial 19
3. Kriteria minimal pemberian pada bantuan sosial 20
4. Jenis bantuan sosial 21
D. Tinjauan Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 21
1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 21
2. Tujuan BPNT 22
3. Manfaat dari BPNT 23
4. Mekanisme Pelaksanaan BPNT 23
5. Dasar Hukum Program BPNT 24

E. Tinjauan Umum E-Warung 25
1. Pengertian E-Warung 25
2. Fungsi E- Warung 25
3. Tujuan adanya E-warung 26
F. Tinjauan Umum Keluarga Pra- Sejahtera 26
1. Pengertian Keluarga Pra Sejahtera 26
2. Ciri-Ciri Keluarga Pra Sejahtera 27
G. Tinjauan Umum Kesejahteraan 28
1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat 28
2. Pengertian Keluarga Sejahtera 29
3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat 29
2.2 Kajian Penelitian Relevan 32
2.3 Kerangka Pikir 34

III. METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 36
3.2 Kehadiran Peneliti 37
3.3 Data Dan Sumber 38
A. Data Penelitian 38
B. Sumber Data 38
1. Sumber Data Manusia 38
3.4 Teknik Pengumpulan Data 38
A. Obseravasi 39
B. Wawancara 39
C. Dokumentrasi 39
3.5 Teknik Pengumpulan Data 39
D. Obseravasi 39
E. Wawancara 39
F. Dokumentrasi 39
3.6 Uji Kredibilitas 39
A. Memperpanjang waktu 39
B. Triangulasi 40
3.7 Teknik Pengolahan Data 40
A. Editing 40
B. Tabulating dan coding 40
C. Intepretasi Data 41
3.8 Teknik Analisis Data 41
A. Pengumpulan Data 41
B. Reduksi Data 41
C. Penyajian Data 41
D. Penarikan Kesimpulan 42
3.9 Tahapan Penelitian 42
A. Pengajuan Judul 42
B. Penelitain Pendahuluan 42
C. Pengajuan Rencana Penelitian 42
D. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian 43
E. Pelaksanaan Penelitian 43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 44
A. Sejarah Desa Sungai Langka 44
B. Kondisi Geografis 47
C. Kondisi Demografis 47
4.2 Kondisi Sosial 49
A. Kesehatan 49
B. Penggunaan Air Bersih 50
C. 7 Keagamaan 50
D. Deskripsi Hasil Penelitian 51
E. Tepat Sasaran 54
F. Tepat Jumlah 60
G. Tepat Harga 60
H. Tepat waktu 62
I. Tepat Kualitas 64
J. Tepat administrasi dalam BPNT adalah proses administrasi bantuan pangan dilakukan dengan benar, efisien, dan transparan. 66
4.2.1. Implementasi BPNT di Desa Sungai Langka Dalam Meningkatkan Kesejahteraan KPM 68

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan 70
5.2 Saran 71
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah KPM Per Dusun Di Desa Sungai Langka..... 4
Tabel 1.3 Sumber Data Manusia 38
Tabel 1.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sungai Langka..... 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Berpikir 35

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara luas yang disertai banyak penduduk di dalamnya. Terdapat latar belakang penduduk yang berbeda, mata pencaharian yang berbeda, tingkat ekonomi penduduk yang berbeda pula mulai dari tingkat ekonomi kelas rendah, kelas menengah, sampai dengan kelas menengah atas. Cara menentukan golongan ekonomi masyarakat tersebut di tinjau berdasarkan 3 kriteria yaitu pendapatan perbulan keluarga, pengeluaran perbulan keluarga, serta jumlah anggota keluarga (Azahri, 2015). Keluarga dengan tingkat pendapatan perbulan rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok maka termasuk dalam keluarga dengan ekonomi kelas rendah atau sering disebut penduduk miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat familiar di dunia terkhusus di negara Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan atau kondisi kekurangan serta ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup baik dalam segi ekonomi ataupun fisik. Kemiskinan terlahir akibat perbedaan sumber daya, serta perbedaan kemampuan. Kemiskinan harus perhatikan bukan hanya oleh mereka yang mengalami kemiskinana akan tetapi juga oleh pihak yang ada diluar kemiskinan itu. Alasan tersebut karena membunuh kemiskinan merupakan tanggung jawab setiap manusia sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai umat beragama, sebagai birokrat, akademisi, ilmuan dan juga sebagai makhluk hidup (Maipita, 2014).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,14 juta atau 9,66% dari total penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia. Angka ini mengalami penurunan menjadi 24,79 juta orang.

Menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan demi mengusahkan kecukupan pangan setiap warga negara. Sesuai pasal 34 ayat1 dikatakan bahwa " Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" dan sekaligus dijelaskan pada pasal 34 ayat 2 bahwa "Negara menembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia" . Untuk mengimplementasikan pasal tersebut pemerintah bersikeras memutus rantai kemiskinan dengan melakukan banyak cara seperti mengeluarkan program-program bantuan, salah satu dari program tersubut ialah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah Non Cash Food Assistance Program. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapakan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Pengertian BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah bantuan pangan yang ditujukan untuk keluarga miskin atau disebut KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Pada awal adanya BPNT di Desa Sungai Langka bantuan tersebut disalurkan satu bulan sekali melalui mekanisme kartu elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan E-warung, berupa beras, telur, buah, dan juga sayur, namun pada saat peneliti

melakukan penelitian bantuan tersebut sudah memiliki mekanisme yang berbeda yaitu pengambilan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp.200.000 per satu bulan dan dana tersebut diperuntukan untuk membeli bahan pangan guna mencukupi kebutuhan pokok KPM.

Inovasi bantuan dengan menggunakan sarana elektronik warung tertera didalam Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang bantuan pengembangan sarana usaha melalui elektronik warung pada pasal 1 ayat (1) “Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara”. Dengan adanya peraturan tersebut maka terciptalah program bantuan yaitu BPNT melalui E-Warung. Tujuan dari program BPNT sendiri yaitu mengurangi beban pengeluaran dan juga memberikannutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat waktu dan tepat sasaran.

BPNT dilaksanakan sejak tahun 2017 program ini merupakan transformasi dari program Raskin atau Rastra yang dalam pelaksanaanya memiliki beberapa permasalahan yang cukup kompleks, salah satunya yaitu kualitas bahan pangan yang diberikan kurang baik dan tidak tepat waktu. Sebelum adanya program BPNT melalui E-warung pendistribusian atau pembagian bantuan pangan kepada masyarakat dapat dikatakan tidak sitematis sehingga membuat orang atau kelompok yang membantu pendistribusian bantuan pangan merasa kesulitan. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah mengeluarkan program BPNT E-warung yang diharapkan mampu memperlancar dan mempermudah masyarakat miskin memperoleh haknya.

Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Desa Sungai Langka terdiri dari 10 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 5.744 jiwa. Jumlah keluaraga Pra Sejahtera di Desa Sungai Langka yaitu sebanyak 496 keluarga per tahun 2020. Dianggap sebagai

keluarga Pra Sejahtera dilihat berdasarkan keadaan rumah serta pendapatan dibawah Rp. 600.000 per bulan sesuai dengan ketentuan nasional dan ditambah beberapa kriteria lain seperti jumlah tanggungan serta bayaknya pengeluaran perbulan.

Berdasarkan pernyataan dari kepala seksi kesejahteraan desa Di Desa Sungai Langka jumlah keluarga yang mendapat BPNT berjumlah 300 keluarga. Pada Implementasinya program BPNT ini dapat berjalan selaras dengan aturan yang telah diterapkan di tingkat nasional. Penerapan program BPNT di daerah khususnya Desa Sungai Langka telah mengikuti aturan aturan yang ada. Contohnya yaitu mendistribusikan bahan pangan dengan jumlah Rp.200.000 per keluarga melalui E-Warung. Selain itu penyaluran BPNT dilakukan melalui mekanisme registrasi, sosialisasi, penyaluran, serta pembelian barang. Hal-hal yang di terapkan di Desa Sungai Langka tersebut berpedoman dari peraturan nasional dan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jalannya BPNT di Desa Sungai Langka sudah menerapkan peraturan yang seharusnya yaitu peraturan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Tabel 1.1 Jumlah KPM Per Dusun Di Desa Sungai Langka

No.	DUSUN	JUMLAH KPM
1.	Dusun 1	41
2.	Dusun 2	13
3.	Dusun 3	31
4.	Dusun 4	23
5.	Dusun 5	28
6.	Dusun 6	24
7.	Dusun 7	14
8.	Dusun 8	30
9.	Dusun 9	42
10.	Dusun 10	54
JUMLAH		300

Sumber: data primer (wawancara dengan agen E- warung di Desa Sungai Langka)

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan program BPNT diberikan kepada KPM memalui kartu elektronik yang dibagikan kepada KPM khusus digunakan hanya untuk membeli kebutuhan pangan masyarakat di pedagang bahan pangan atau warung yang terdaftar dan bekerjasama dengan Bank atau sering disebut E-Warung. Warung yang dipilih untuk bekerjasama dengan Bank tersebut dipilih langsung oleh aparat desa yang dianggap mampu mengelola jalannya pembagian BPNT di desa tersebut. Warung yang terpilih di gunakan sebagai tempat pelayanan untuk pengambilan BPNT yang diperoleh KPM.

Menurut Eko (2019) Program BPNT dikatakan berhasil apabila telah mencapai indikator 6T yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Dari hasil observasi awal peneliti menemukan adanya masalah yaitu terdapat KPM yang kondisi rumahnya sudah berlantaikan keramik, dan ada beberapa KPM yang memiliki kendaraan roda dua terbaru. hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan program BPNT sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan pangan tersebut disalurkan kurang tepat sasaran. Menurut kepala seksi kesejahteraan di Desa Sungai Langka setidaknya ada 15% atau sekitar 45 KPM yang kondisi rumahnya berlantaikan kramik dan sudah layak. Fenomena tersebut menjadi salah satu permasalahan karena menjadi isu masyarakat yang disebabkan oleh kecemburuan sosial.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri atas 14 (empat belas) kriteria kemiskinan. Menurut Kemensos RI, 14 (empat belas) kriteria kemiskinan meliputi :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m^2 per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : Petani dengan luas lahan 500 m^2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti didapat bahwa penerima BPNT masih tidak sesuai dengan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu. Hal ini dapat dilihat dengan kondisi tempat tinggal penerima bantuan yang sudah sangat layak dengan berlantaikan keramik. Selain itu penerima BPNT juga memiliki kendaraan roda dua terbaru dan hampir setiap penerima bantuan memiliki minimal satu kendaraan roda dua. Berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan penyaluran program bantuan pangan non tunai terlihat dari masih adanya masyarakat yang, jika dilihat dari kondisi ekonominya, seharusnya tidak memerlukan bantuan tersebut. Namun, mereka tetap menerima bantuan ini. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang dikembangkan pemerintah untuk mengentas kemiskinan.

BPNT tentu memilki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, sesuai dengan sila ke 5 pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki amanat bahwa negara wajib memajukan kesejahteraan umum. Menurut Peneliti, Penelitian ini termasuk kedalam aspek politik dan kenegaraan sebab program BPNT E- warung merupakan salah satu kebijakan publik yang mengkaji aspek- aspek hak dan kewajiban warga negara, peran serta dalam melakukan pemecahan masalah sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa sekarang permasalahan kesejahteraan sosial memperlihatkan masi adanya warga negara yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara layak karena belum mendapatkan pelanyanan sosial dari negara. Dampak dari hal tersebut yaitu terdapat sejumlah warga negara yang mengalami hambatan terhadap pelaksanan fungsi sosial yang mengakibatkan warga negara tersebut tidak mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan juga bermartabat. Untuk mencegah hal tersebut maka salah satu contoh tindakan pemerintah dijalankan program BPNT di Desa Sungai Langka untuk menunjang kesejahteraan warga negara. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ”**Implementasi Program BPNT E-warung Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera di Desa Sungai Langka”.**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Program BPNT E-warung Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera di Desa Sungai Langka”.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan?
2. Apa Kendala dalam Implementasi Proram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tataan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sungai Langka Kexamatan Gedong Tataan.

2. Untuk mngetahui Kendala Kendala Dalam Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Membantu pengembangan serta memperkuat teori yang sudah ada dalam bidang pendidikan khususnya dalam Pendidikan Pacasila dan Kewarganegaan dalam lingkup politik dan kenegaraan.

2. Manfaat Praktis
   a. Dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti mengenai implementasi program BPNT E – Warung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga pra sejahtera di Desa Sungai Langka sehingga peneliti dapat berbagi pengetahuan
   b. Dapat digunakan bagi peneliti berikutnya sebagai perbandingan sehingga mampu membuat karya ilmiah yang lebih sempurna dan kompleks
   c. Sebagai pertimbangan serta masukan bagi kepala dan perangkat desa dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin terutama dalam usaha pemenuhan pangan di Desa Sungai Langka.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

   Penelitian yang dilakukan ini akan meningkatkan pengetahuan baru dalam konteks Pendidikan terkhusus dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam wilayah kajian pendidikan politik dan kenegaraan, dikarenakan penelitian ini mendeskripsikan implementasi program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga pra sejahtera di Desa Sungai Langka.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

   Ruang lingkup objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi program BPNT terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga pra sejahtera diDesa Sungai Langka

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

   Guna mendukung proses penelitian ini maka diperlukan subjek penelitian itusendiri, dalam hal tersebut maka subjek penelitian ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Sungai Langka

4. Ruang LingkupWilayah Penelitian

   Wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan pada penelitian ini adalah Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ProvinsiLampung

5. Ruang Lingkup Waktu

   Waktu dalam melaksanakan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya Surat Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Nomor 8257/UN26.13/PN.01.00/2021 pada tanggal 16 November 2021

1.7 Definisi Istilah

Demi menunjang pelaksanaan penelitian perlu diketahui istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Implementasi diartikan secara umum sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia yaitu penerapan atau pelaksanaan. Penggunaan kata Implementasi biasanya berkaitan dengan suatu kegiatan yang pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2. kesejahteraan menurut KBBI berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, makmur, sentosa, dan selama, terlepas dari segala gangguan, kesukaran dan sebagainya.
3. Bantuan Pangan Non Tunai adalah program bantuan yang berasal dari pemerintah yang diberikan kepada penduduk miskin yang ada di Indonesia dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dengan cara memenuhi pengeluaran akan kebutuhan pangan pada penduduk miskin di Indonesia.
4. Keluarga pra sejahtera, diartikan sebagai suatu keluarga yang tidak bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan pokonya sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teoritis

A. Tinjauan Umum Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik yaitu tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan publik atau masyarakat dengan cara menggunakan program-program maupun bentuk upaya yang lain. Menurut Thomas R dye kebijakan public dinilai suatu hal yang bleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh masyarakat sebagai pilihan dari pemerintah demi kepentingan bersama (Nawawi, 2009). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam suatu kebijakan yang memilki kewenangan adalah pemerintah, yang diharapkan mampu memberikan kebijakan serta program dengan tujuan yang jelas dan pasti untuk menyelsaikan permasalahan yang ada sehingga mampu memberikan dampak baik untuk masyarakat.

Menurut Suwitri (2008) kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu hukum,tetapi tidak hanya hukum juga melainkan harus memahaminya, secara keseluruhan. Ketika timbul sebuah isu yang menyangkut kepentingan bersama dinilai perlu untuk diatur,formulasi terhadap isu itu lah yang menjadi kebijakan publik yang musti dilakukan dan disusun serta disepakati oleh pemeritah yang berwenang.

Kebijakan publik menurut pemahaman Herdiana (2008) diartikan bahwa kebijakan publik merupakan suatu aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang berguna untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat supaya bisa sesuai dengan kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik ialah suatu aktivitas

yangdiperbolehkan atau tidak diperbolehkan, memiliki tujuan tertentu dan sumbernya berasal dari pihak yang berwenang demi kebaikan bersama.

2. Bentuk- Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik terdiri dari beberapa bentuk yang setiap bentuk memiliki sifat yang hierarkis, artinya terdapat kebijakan yang lebih tinggi yang akan diikuti oleh kebijakan lain dibawahnya. Seperti pemerintahan kita yang mengeluarkan peraturandari pusat lalu diikuti dengan peraturan-peraturan daerah. Menurut Nugroho (2014) dikatakan ada empat bentuk kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan formal, merupakan keputusan-keputusan yang telah disusun secara tertulis lalu disahkan dan diformalkan supaya bisa berlaku. Seperti perundang undangan, hukum, dan regulasi
2. Kebiasaan umum lembaga-lembaga publik atau kesepakatan umum yang telah diterima bersama (kovensi), kebijakan ini tumbuh dari proses manajemen organisasi publik seperti SOP tidak tertulis dan tertulisnamun tidak di formalkan serta upacara rutin. Beberapa konvensi juga bisa berasal dari actor organisasi publik, contohnya pidato presiden yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus. Konvensi juga ada yang ditumbuhkan dari masyarakat sendiri contohnya upacara 17 Agustus.
3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik, peryataan pejabat public diwajibkan mewakili lembaga publik sehingga ditunt untuk bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan.
4. Perilaku pejabat publik, perilaku yang dilakukan pejabat publik sebagian besar akan di contoh oleh rakyatnya. Sehingga pejabat public diharapkan mampu berperilaku baik.

3. Jenis Kebijakan Publik

Kebijakan publik di lakukan setelah adanya isu atau permasalahan yang terjadi pada ruang lingkup atau wilayah tertentu. Berdasarkan hal ini lalu muncul beberapa jenis kebijakan publik yang berbeda. Kebijakan–

kebijakan ini akan di gunakan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Terdapat lima jenis kebijakan publik menurut Nugroho (2014) yaitu:

1. *Constituent*: merupakan kebijakan formal yang tegas dengan memperhatikan bentuk struktur pemerintahan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang membuktikan keberadaan suatu negarayang didalamnya sudah termasuk kebijakan keamanan negara.
2. *Distributive :*kebijakan ini membahas tentang alokasi layanan dan manfaat untuk kelompok masyarakat tertentu. Contohnya pembangunan irigasi untuk kelompok petani dari pemerintah.
3. *Regulatory :*kebijakan yang melarang perilaku tertentu bagi individuatau kelompok. Contohnya kebijakan untuk mengatasi suatu konflik yang terjadi dalam suatu kelompok tertentu.
4. *Self regulatory:*pengertian jenis kebijakan ini mirip dengann jenis regulatory akan tetapi perbedannya kebijakan ini dibuat oleh pelakunya sendiri. Contohnya kebijakan dalam praktek dokter bagimereka yang berprofesi dokter professional dimana kebijakan yangdibuat bertujuan untuk membatasi perilakunya sendiri.
5. *Redistributive:* kebijakan ini dibuat sebagai upaya untuk memberikan pemindahan alokasi kesejahteraan, hak-hak kelompok tertentu, ataupun kekayaan.

4. Tujuan kebijakan Publik

Pada kebijakan publik unsur tujuan menjadi unsur yang penting, sesuai dengan pendapat Alie (2012) bahwa kebijakan publik merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dimana dalam tujuan tersebut terkandung nilai kebaikan untuk kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Nugroho dalam (Handoyo, 2012) secara umum kebijakan publik disusun memiliki tujuan untuk mengatur kehidupan bersama.

Menurut Hogewerf dalam buku (Alie, 2012) mengatakan bahwa tujuan umum kebijakan publik ialah:

1) Memelihara ketertiban umum
2) Melancarkan perkembangan pada masyarakat
3) Membagi dan meperukan mentri

Berdasarkan hal hal tersebut jelas bahwa setiap tujuan kebijakan publik haruslah demi kepentingan publik. Dengan adanya tujuan yang jelas maka diharapkan nantinya implementasi atau pelaksanaanya selaras dengan apa yang telah diharapkan.

B. Tinjauan Umum Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi digunakan untuk mengartikan kata penerapan dari sesuatu yang telah kita pelajari atau kita pahami. Menurut Usman dalam (Rosad,2019) "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan". Berdasarkan pengertian yang dijelaskan diatas implementasi tidak hanya sebuah aktivitas, berarti implementasi bukan sekedar penerapan atau tindakan belaka melainkan tindakan atau aktivitas yang memilki arah yang sudah direncanakan dengan matang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Mulyadi dalam (Apriandi, 2017) implementasi merujuk pada tindakan atau perlakuan guna mencapai tujuan-tujuan yang sudah di tentukan pada sebuah keputusan. Aksi tersebut berupaya untuk mengganti sebuah keputusan- keputusan menjadi pola-pola oprasional dan berupaya memperoleh transformasi atau perubahan baik kecil maupun besar seperti yang telah disepakati sebelumnya. Implementasi juga dapat diartikan sebagai cara pemahaman dari sesuatu yang seharusnya terjadi setelah dilaksanakan sebuah program.

Dunn (2003:109) menyatakan bahwa Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang

dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang- bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain. Berdasarkan Pendapat diatas dapat disimpulkan implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan.

2. Proses Implementasi

Dalam praktiknya arti implementasi adalah jalannya pelaksanaan keputusan dasar. Terdapat beberapa tahapan dalam proses tersebut yang dapat mendukung jalannya Implementasi yaitu:

1. Tahapan pengesahan pada peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan yang dilakukan intsansi pelaksana
3. Kesanggupan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan seperti yang diinginkan instansi pelaksan
6. Dampak keputusan seperti yang diinginkan instansi pelaksana
7. Cara perbaikan terhadap kebijakan dan peraturan perundangan.

Dilihat dari beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa implementasi merupakan jalannya sebuah proses yang memilki hubungan terhadap program-program serta kebijakan yang berasal dari institusi tertentu khususnya institusi negara yang bersedia mencukupi sarana dan prasarana serta segala bentuk kebutuhan untuk mendukung jalannya suatu program demi mendapat hasil maksimal seperti yang direncanakan.

3. Implementasi Kebijakan

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatankegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut George C. Edwards III sebagaimana dikutip dalam buku (Nugroho, 2014:503) menjelaskan bahwa ada empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan. Empat faktor tersebu adalah faktor komunikasi (communication), sumber- sumber (resources), kecenderungan - kecenderungan atau tingkah laku - tingkah laku (dispotitions), serta serta struktur birokrasi (bureaucratic stucture). Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C Edward III disebut dengan Direct andIndirec inpac on Implementation. Yang mana dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, apabila aspek-aspek tersebut dapat bersinergi dengan baik maka akan memberikan peluang yang besar bagi tercapainya keberhasilan implementasi kebijakanpublik. Menurut George C Edward III dikutib dalam buku (Subarsono, 2005:89) aspeek yang dimaksud ialah:

1. Komunikasi

   Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah 17 untuk pelaksanaanyatelah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk petunjuk pelaksanaankebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber Daya

   Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Disposisi

   Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensikonsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur Birokrasi

   Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Struktur birokasi ini menurut Edward III mencakup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum Bantuan Sosial

1. Pengertian Bantuan Sosial

Berdasarkan pendapat Dadu (2021) Bantuan sosial ialah bantuan pemberian pemerintah tingkat daerah yang ditujukan kepada keluarga, individu, atau masyarakat. Bantuan tersebut berupa uang atau barang dimana jumlah yang diberikan kepada masyarakat tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian dan hasil dari sasaran program sebagai kegiatanpemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, rasionalitas, kepatuhan serta manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan UU No11 Tahun 2009 berkaitan dengan kesejahteraan sosial, bantuan sosial ialah upaya yang memilki tujuan untuk meringankna penderitaan, memulihkan, melindungi kondisi kehidupan baik mental, fisik maupun sosial termasuk didalamnya kondisi ekonomi dan psikososial sekaligus memberdayakan kemampuan dan potensi yang ada pada seseorang atau individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat (Taufiqo, 2018).

Bantuan sosial juga diartikan sebagai transfer barang ataupun uang yang ditujukan kepada masyarakat untuk melindungi probabilitas terjadinya resiko sosial serta bertujuan memaksimalkan kesejahtaraan rakyat (Maarif,2018). Bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat secara langsung melalui lembaga kemasyarakatan, bantun sosial tidak diberikan secara terus menerus dan juga slektif. Bantuan sosial dapat diberikan dengan syarat tertentu ataupun bisa tanpa syarat dan cuma- Cuma. Di lihatdari waktu atau durasinya bantuan sosial bersifat sementara misalnya diberikan kepada korban terkena bencana alam, dan juga dapat diberikan secara tetap bagi penyandang cacat.

Bantuan sosial berdasar Pasal 1 angka 15 Pemendargri No. 32 Tahun 2011 adalah pemberian bantuan yang berwujud uang atau barang berasal dari pemerintah daerah kepada individu atau seseorang, keluarga, dan

juga kelompok atau masyarakat guna melindungi dari adanya kemungkinan resiko sosial. Pengertian resiko sosial yang dimaksud yaitu sesuai dengan pasal 1 angka 16 permendagri No.32 Tahun 2011 yaitu peristiwa atau kejadian yang bisa menimbulkan potensi kerentangan sosial yang akibatnya ditanggung oleh individu, keluarga atau kelompok masyarakat akibat dampak dari krisis ekonomi,krisis sosial, krisis politik, bencana alam dan fenomena alam yang apabila tidak diberikan bantuan sosial makatidak bisa hidup dalam kondisi yang wajar dan semakin terpuruk.

Maka berdasarkan pendapat diatas bantuan sosial dapat dairtikan sebagai bantuan atau transfer barang maupun uang dari pemerintah yang ditujukan kepada keluarga, individu, maupun kelompok berdasarakan syarat tertentu dan juga tujuan yang telah ditetapkan.

2. Kriteria dan Sifat Bantuan Sosial

Terdapat kriteria dan sifat bantuan sosial berdasarkan Bab IV Pemendagri No. 32 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali dengan Pemendagri No. 39 Tahun 2012 yaitu:

1. Bantuan sosial dapat disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mengutamakan pemenuhan belanja wajib dan memperhatikan asas keadilan, rasional, kepatutan, serta manfaatnya bagi masyarakat
2. Anggota masyarakat yang berhak dapat bantuan sosial yaitu:
   a) Seseorang, keluarga atau masyarakat yang telah mengalami suatu keadaan tidak stabil yang merupakan akibat dari krisis ekonomi, krisis sosial, politik, bencana ataupun fenomena alam supaya mampu memenuhi kebutuhan hidup yang minimum.
   b) Lembaga yang termasuk non pemerintah bidang keagamaan, pendidikan, dan dari bidang lainnya memiliki peran melindungi seseorang atau individu, kelompok, maupun masyarakat terhadap terjadinya kemungkinan resiko sosial.

3. Bantuan sosial yang disalurkan dalam dalam bentuk uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
   a) Bantuan sosial yang sebelumnya telah direncanakan, bantuan ini di tujukan pada seseorang atau keluarga yang nama, alamat, jumlah nominalnya sudah tercantum jelas keikan penyusunan APBD
   b) Bantuan sosial yang sebelumnya tidak direncanakan, bantuan ini di buat untuk memenuhi kebutuhan yang disebabkan oleh resiko sosial yang sebelumnya tidak diperkirakan ketikan penyusunan APBD namun jika ditunda penangannyan bisa membuat resiko sosial lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Batasan anggaran pada bantuan sosial ini tidak bisa melebihi batasan anggaran bantuan sosial berupa uang yang telah direncanakan.

3. Kriteria minimal pemberian pada bantuan sosial

Dalam pelaksananaan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat pemerintah memiliki kriteria atau patokan yang digunakan sebagai dasar seseorang atau kelompok berhak atau tidak mnerima bantuan sosial.

Kriteria tersebut antara lain:

1) Selektif
2) Memenuhi persyaratan, yaitu identitas yang jelas dan berdomisili di wilayah pemerintahan suatu daerah yang berkenaan
3) Sifatnya sementara tidak terus menerus, dapat berkelanjutan apabila berada dalam keadaan tertentu.
4) Sesuai dengan tujuan penggunaan yaitu :
   a. Rehabilitasi atau pemulihan kemampuan seseorang yang telah mengalami disfungsi sosial supaya bisa melakukan fungsi sosialnya dengan wajar dan seharusnya
   b. Perlindungan sosial, bertujuan menangani dan mencegah resiko akibat rentang sosial yang dialami oleh seseorang, keluarga, ataupun kelompok masyarakat supaya hidupnya bisa terpenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal

c. Pemberdaya sosial, yaitu dimaksudkan untuk membangunkan daya seseorang atau kelompok yang telah mengalami masalah sosial sehingga bisa memnuhi kebutuhan dasarnya.
d. Jaminan sosial yaitu, rencana yang menjamin penerima bantuan supayabisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
e. Penanggulangan kemiskianan, ialah program atau kebijakan yang dilakukan untuk individu , keluaraga ataupun kelompok masyarakat yang mempunyai atau tidak mempunyai sumber penghasilan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemnausiaan
f. Penanggulangan bencana ialah ikatan upaya dan cara-cara untuk rehabilitasi.

4. Jenis bantuan sosial

Terdapat dua jenis bantuan sosial yang bisa di dapatkan masyarakat ketika dirinya termasuk dalam kriteria yang ditentukan sehingga berhak mendapat bantuan sosial

a) Bantuan sosial yang berupa uang diberikan langsung kepada penerima, contohnya beasiswa anak tidak mampu, yayasan yatim piatu, lansia, cacat, terlantar, serta putra putri pahlawan yang hidupnya tidak mampu.
b) Bantuan sosial yang berupa barang, diberikan langsung pada penerima,misalnya kendaraan untuk sekolah swasta luas biasa dan juga masyarakat tidak mampu.

D. Tinjauan Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Berdasarkan Julainto (2020) BPNT merupakan program yang di bentuk pemerintah yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Bantuan BPNT inidi salurkan setiap satu bulan sekali kepada KPM melalui kartu elektronik yang saldonya hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan di warung yang telah bekerja sama dengan bank sebagai perantara penyaluran BPNT. Dengan

dikeluarkannya program bantuan ini masyarakat diharapkan bisa merasa terbantu meskipun tidak seluruh kebutuhan terpenuhi setidaknya kebutuhan pangan yang pokoksudah tercukupi untuk kehidupan sehari.

Eko (2019) mengatakan bahwa BPNT adalah bantuan pangan yang diupayakan pemerintah guna memperbaiki kesejahteraan pangan sertamemberikan perlindungan untuk keluarga miskin dengan mendistribusikan pangan yang harapannya bisa menjangkau keluarga-keluarga miskin. Untuk melihat keberhasilan BPNT dalam pelaksanaannya apabila telahmencapai indikator 6T yaitu:

a) Tepat sasaran, tepat sasaran berarti bantuan tersebut meluncur kepada orang yang seharusnya, semestinya, serta kepada orangyang memilki hak dan memang pantas mendapatkan BPNT
b) Tepat Jumlah, jumlah bahan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat telah ditetapkan oleh pemerintah dikatakan tepat jumlah bila memang yang diberikan kepada KPM sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.
c) Tepat harga, artinya bahan pangan yang didapatkan berupa beras,telur, buah, dan sayur sesuai dengan ketentuan yaitu geratis.
d) Tepat waktu, waktu pembagian BPNT yaitu setiap satu bulansekali
e) Tepat Kualitas, kualitas dari bahan pangan yang akan di salurkanharus tepat kualitas yang telah disepakati, bahan pangan yang di berikan tersebut berasal dari *supplier* yang disalurkan ke warungpenempatan lalu selanjutkan dibagikan kepadaa KPM.
f) Tepat administrasi, KPM yang mendapatkan BPNT harus memenuhi syarat berdasarkan data desa sehingga pantas diberikanbantuan untuk kelangsungan hidupnya.

2. Tujuan BPNT

Program BPNT memiliki beberapa tujuanyang telah ditentukan oleh pemerintah, tujuan tersebut merupakan hal yang ingin dicapai demi kepentingan bersama, menurut Dini (2018) tujuan tersebut yaitu:

a) Mengurangi beban yang dikeluarkan KPM dengan berusaha memenuhi sebagaian kebutuhan yaitu kebutuhan pangan yangpokok
b) Memberikan KPM nutrisi yang cukup dan lebih seimbang
c) Meningkatkan dan memperbaiki ketepatan sasaran dan juga ketepatan waktu

Sedangkan menurut Rosalina (2019) tujuan BPNT ialah:

a) Mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
b) Memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbangkepada KPM BPNT
c) Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi
d) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNTdalam memenuhi kebutuhan pangan.

3. Manfaat dari BPNT

Program BPNT memiliki beberapa manfaat yang diharapkan masyarakat mampu merasakan dampak baik dari manfaat tersebut:

1) Ketahanan pangan serta mekanisme perlindungan sosial sekaligus penanggulangan kemiskinan yang di lakukan pemerintah semakin meningkat
2) Efesiensi dalam penyaluran bantuan sosial semakin membaik dan meningkat.

4. Mekanisme Pelaksanaan BPNT

Mekanisme atau cara-cara yang harus di lakukan supaya pelaksanaan program BPNT dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu:

1) Persiapan program: ketika kementrian sosial bekerja sama dengan bank kemudian dilakukan koordinasi pelaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah kota.

2) Perispan E-Warung: setelah bank memilki data dan mengetahui jumlah calon KPM dilokasi penerima bantuan, bank dibantu pihak desa mengidentifikasi agen dan pedagan sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditentukan untuk menjadi warung penempatan sebagai
   tempat penyaluran bantuan.
3) Sosialisasi dan edukasi: kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara,misalnya melalui sosilaisasi langsung, audio,cetak, dan juga audiovisual.
4) Pelaksananaan pendaftaran KPM
5) Penyaluran bantuan: penyaluran dana dari bank dikirimkan kepadaKPM
6) Pemanfaatan bantuan: pembelian bahan pangan yang dilakukan KPM di E-Warung yang telah ditentukan.

5. Dasar Hukum Program BPNT

Adanya program BPNT tentunya didasari oleh peraturan peraturan negara serta untuk mendukung jalannya program yang menjadi ketentuan serta melandasi adanya program, berikut merupakan dasarhukum BPNT:

1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bahwa bantuan sosial yang ditunjukan kepada masyarakat dilaksanakan secara efisien supaya bisa diterima dengan tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat administrasi. Dengan adanya peraturan ini maka presiden Republik Indonesia berharap agar penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan
2) dengan efisien sehingga mampu mendukung kenaikan manfaat bagi penerima dan juga berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif. (Julianto, 2020)
3) Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
4) Peraturan Mentri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yaitu tentang PenangananFakir Miskin .
6) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 yaitu tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatanwilayah
7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 yaitu tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
8) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 yaitu tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
9) Perturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 yaitu tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga.
10) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
11) Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 yaitu tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementrian Sosial.

E. Tinjauan Umum E-Warung

1. Pengertian E-Warung

E-warung merupakan hasil dari kerjasama antara kementrian sosial (Kemensos) dengan Bank pelaksana, Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog), serta Koprasi Masyarakat Indonesia sejahtera (KMIS) yang bertujuan untuk pendistribusian bantuan sosial BPNT. Berdasarkan program sembako yang telah ditentukan besaran saldo yaitu senilai Rp.200.000/ bulan .Dana tersebut tidak dapat diambil tunai akan tetapi hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang telah di tentukan (Intan, 2022).

2. Fungsi E- Warung

Peraturan Mentri Sosial No. 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui E-warung menjelaskan bawa fungsi E-warung yaitu sebagai tempat menjual bahan pangan yang murah akan tetapi berkualitas serta menjual kebutuhan pokok rumah tangga,

sebagai agen bank penyalur bansos non tunai, serta tempat pemasaran hasil produksi Kube dan juga sebagai layanan koprasi simpan pinjam. (Azwar, 2018)

3. Tujuan adanya E-warung

Menurut Azwar (2018) secara konseptual, mekanisme pendistribusian bansos memalui E-warung memiliki kelebihan disbanding dengan mekanisme sebelumnya. Pola pendistribusian memalui E-warung berbeda dengan bansos-bansos sebelumnya. Program E-warung mampu mencapai beberapa tujuan sekaligus, yaitu:

1) Program E-warung memberdayakan masyarakat yang kurang mamapu agar lebih sejahteta sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan
2) Program E-warung meningkatkan akses keluarga miskin ke pelayanan keunagan inklusif serta menghilangkan penyalahgunaan bantuan.
3) Program E-warung merupakan bagian dari usaha membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam upaya pengentasan masyarakat miskin.
4) Penerima bantuan sosial bisa menerima bantuan sesuai dengan jumlah, tepat waktu, serta tepat sasaran, dan juga secara bertahapbantuan sosial bisa diintergrasikan dalam format nontunai.
5) E-warung sekaligus berfungsi sebagai agen bank sehingga bisa membina keluarga miskin tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga melibatkan dunia usaha.

F. Tinjauan Umum Keluarga Pra- Sejahtera

1. Pengertian Keluarga Pra Sejahtera

Menurut Kusuma (2015) keluarga pra sejahtera ialah keluarga-keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar atau *basic needs* secara minimal, contohnya seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan juga kesehatan anggota keluarga.

Berdasarkan pendapat Suprajitno (2004) keluarga pra sejahtera ialah

keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, yaitu kebutuhan pangan, sandang, pengajaran agama, papan, dan kesehatan, atau keluarga yang belum bisa memenuhi salah satu atau lebih indikator keluarga sejahtera tahap 1.

Keluarga pra sejahtera sering diartikan sebagai keluarga yang tidak mampu memenuhi salah satu ataupun beberapa kebutuhan pokok yang mengakibatkan keluarga tersebut lebih fokus pada perbaikan ekonomi sehingga membuat kebutuhan yang lain terabaikan. Terkadang seoranganak dari keluarga pra sejahtera harus putus sekolah demi meringankanbeban keluarga. Dilihat dari sisi lain keluarga pra sejahtera cenderung kurang memahami agama yang berpengaruh dan berdampak pada pengetahuan sang anak. (Nugraha, 2019)

Maka dapat disimpulkan bahwa keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang keadaan hidupnya tidak mampu memenuhi satu atau lebihdari satu kebutuhan pokok yang dampaknya anggota keluarga tersebut focus pada perbaikan ekonomi dan mengabaikan kebutuhan yang lain.

2. Ciri-Ciri Keluarga Pra Sejahtera

Terdapat beberapa ciri yang dapat menggambarkan bahwa sebuah keluarga termasuk dalam tahap keluarga pra sejahtera. Menurut Idtesis (2007).

keluarga pra sejahtera memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar
b) Tidak mampu mencapai pelayanan kesehatan
c) Bagian lantai rumah adalah tanah
d) Minimnya jenjang pendidikan

G. Tinjauan Umum Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dianggap sebagai suatu pertumbuhan yang tinggi di dalam pembangunan ekonomi.Menurut Zaman (2021) kesejahteraan hidup adalah suatu siklus yang didalamnya melibatkan perubahan aspek dasar kehidupan manusia yang kurang meningkat terhadap suatu keadaan yang lebih baik didalam suatu kelompok masyarakat.Kesejahteraan diartikan sebagai suatu keaadaan yang sehat, senang, dan nyaman terhadap konsumsi barang dan juga pelayanan.Sedangkan menurutnya Kesejahteraan masyarakat ialah kondisi terpenuhi kebutuhan-kebutuhan material, sosial dan juga spiritual dari warga negara supaya dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya sebagai penyelengaraan kesejahteraan sosial.

Menurut Badrudin (2012) pengertian kesejhteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.”

Sehingga dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan pada taraf hidup masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar serta menjadikan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

2. Pengertian Keluarga Sejahtera

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 keluarga sejahtera adalah keluarga yang berasal dari perkawinan yang sah,dimana keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhan materil yang layak dan juga kebutuhan spiritual , bertaqwa kepada Tuhan YME, mempunyai hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan keluarga serta dengan masyarakat lingkungannya. Sedangkan menurut BKKBN keluarga sejahtera yaitu keluarga yang memenuhi kebutuhan anggotanya mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, sosial, serta agama. (Kusuma, 2015).

Menurut Rochaida (2016) Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhikebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Pengertian Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhnya kebutuhandasar manusia dari setiap anggota masyarakat secara material, sosial, mental, dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat (Septiani,2019).

Maka pengertian keluarga sejahtera yaitu keluarga yang mampu mencukupi kebutuhan materil dan spiritual memiliki hubungan baik dengan sesame anggota,lingkungan, dan juga kepada tuhan.

3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan BKKBN 2011 terdapat beberapa indikator dan tahapan untuk mencapai keluarga sejahtera, yaitu:

a) Tahap Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera ialah keluarga yang masi belum dapat memenuhi dan mencukupi kebutuhan dasarnya secara minimal. Contohnya kebutuhan sandang, pangan, spiritual, keluarga berencana, dan kesehatan.

b) Tahap Sejahtera 1

Keluarga sejahtera 1 merupakan keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial dan juga psikologis seperti kebutuhaninteraksi dalam keluarga, kebutuhan interaksi dengan lingkungan,kebutuhan pendidikan, serta pekerjaan yang dapat menjamamin kehidupn yang layak.

c) Tahap Sejahtera II

Tahap ini keluarga terlihat tidak mampu memenuhi salah satu indikator berikut: a) sebagian penghasilan yang didapatkan keluargadapat disiskan untuk menabung; b) keluarga memiliki upaya untuk meningkatkan pengetahuan dalambidang agama; c) makan bersamakeluarga minimal satu kali seminggu untuk berdiskusi dan berkomunikasi; d) memperoleh berita dan informasi dari TV, radio, surat kabar, ataupun majalah; e) Mengikuti kegiatan masyarakat.

d) Tahap Sejatera III

Keluarga ini tampak belum mampu memenuhi salah satu indikator berikut:

1) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan;
2) Memberikan sumbangan materil secara teraatur

e) Tahap Sejahtera III plus

Keluarga ini merupakan keluarga yang mampu memnuhi segala indikator dari keluarga pra sejahtera, sejahtera I, sejahter II, dan jugasejahtera III.Kesejahteraan sesuai sila ke-5 pancasila dan Undang- Undang Dasar NRI 1945

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman dengan nilai-nilai luhur yang bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka pengamalan Pancasila Sila ke-5 yang berbunyi: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, hendaknya diajarkan dan diamalkan dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.Yudi Latif (dalam Negara Paripurna 2011) berpendapat bahwa sila ke-5 yang berbunyi

“Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila.Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakanperwujudan sekaligus cerminan imperatif etis keempat sila dalam Pancasila lainnya. Febra Anjar Kusuma (2025) keadilan sosial merupakan perinsip fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam 33 Ayat (3) dan 34 ayat (2) UUD Negara Kesayuan Republipk Indoonesia 1945

Implementasi Sila ke-5 Pancasila juga telah diwujudkan dalam upaya penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yakni rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.Upaya tersebut telah dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan oleh Pemerintah Pusat tentunya untuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.Supaya warga negara tidak mengalami hambatan

pelaksanaan fungsi sosial sehingga dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Kesejahteraan keluarga juga mempengaruhi tingkat pendidikan anak. semakin tinggi jenjang sekolah, maka semakin besar pula biaya, sehingga banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, terutama anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan anak-anak tersebut memilih bekerja. Deny, Hermi, Yunisca (2017)

2.2 Kajian Penelitian Relevan

1. Penelitian relevan ialah penelitian yang dilakukan oleh Imal Almial Akmal yang dilaksanakan pada tahun 2020 mahasiswa Universitas Muhammadiah Makassar program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan judul " Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa" penelitian tersebut memilki tujuan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi implementasi BPNT di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada aspek kesejahteran keluarga pra sejahtera serta implementasinya.

2. Penelitian oleh Dita Rizki Anindy Putri Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Oleh Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bima. Penelitian ini menghasilkan bahwajalnnya programBPNT di Kecamatan Bima belumefektif, hal tersebut dapat dilihat dari pemahaman masyarakat mengenai program BPNT yang dapat dikatakan baik, ketepatan sasaranpenerima BPNT yang masih kurang tepat karena pembaharuan masyarakat miskin yang belum efisien, ketepatan waktu dalam pencairan BPNT kepada KPM kurang baik karena sering terlambat, tujuan dari program BPNT telah terlaksana dengan baik terlihat dari kuarangnya beban pengeluaran serta membantu memenuhi kebutuhan pangan KPM, yang terkhir yaitu perubahan secara nyata yang dialamioleh penerima BPNT sudah dirasakan cukup baik sebab KPM telah merasakan manfaat dari program ini.

3. Penlitian yang dilakukan oleh Eko Yudianto Yunus pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigara Kota Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dan hasildari penelitian ini adalah keberhasilan implementasi program BPNT dapat dipengaruhi oleh beberap faktor diantaranya yaitu sikap (disposisi) kurang berhasildalam kualitas beras, sasaran KPM yang tepat, serta jumlah beras yangditerima KPM.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Benny Rachman, Adang Agustian, dan Wahyudipada 17 April 2018 dengan judul Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini bertujuan mengkaji evektifitas pelaksanaan Rasta dan BPNT melaului aspek 6T (tepat sasaran, tepat waktu,tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas,dan tepat administrasi) dan merumuskan saran kebijakan perbaikan pelaksanaan Rastra dan BPNT.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Indah Setiyowati dari UniversitasIslam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Efektivitas ProgramE-warung Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada Desa Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo Di Kabupaten Lampung Tengah) dengan hasil penelitian yaitu program program BPNT E-warung di Desa SriPurnomo sudah dilaksanakan dengan baik karena telah memenuhi indikator 6T dan sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta variabel tentang program BPNT E-warung dan juga membahas tentang kesejahteraan. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu penulis menambahkan kesejahteraan dalam sudut pandang Pancasila dan UUDNRI 1945.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur atau arah pemikiran penulis sendiri dan juga mengambil suatu teori yang dianggap cocok dan relevan dengan topic yang dibahas untuk menjawab pertanyaan yang ada.Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai implementasi program BPNT e-warung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga pra sejahtera di Desa Sungai Langka.

Kemiskinan masi menjadi permasalahan utama di wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di desa terpencil. Dalam rangka meringankan beban dalammemenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, salah satu tindakan pemerintah yaitu dengan mengeluakannya programBPNT. Harapannya dengan adanya program BPNT keluarga pra sejahtera yang terdaftar mampu melengkapi nutrisi dengan seimbang tanpa membebankan biaya.

Meskipun kebijakan yang baik tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan akan tetapi dengan program BPNT ini sangat mengusahakan ketepatan sasaran. Karena kebijakan yang kurang tepat sasaran ada kalanya semakin membuat masyarakat miskin secara structural. Agar penelitian ini lebih mudah dipahami maka dibuatlah kerangka pikir sebagai berikut

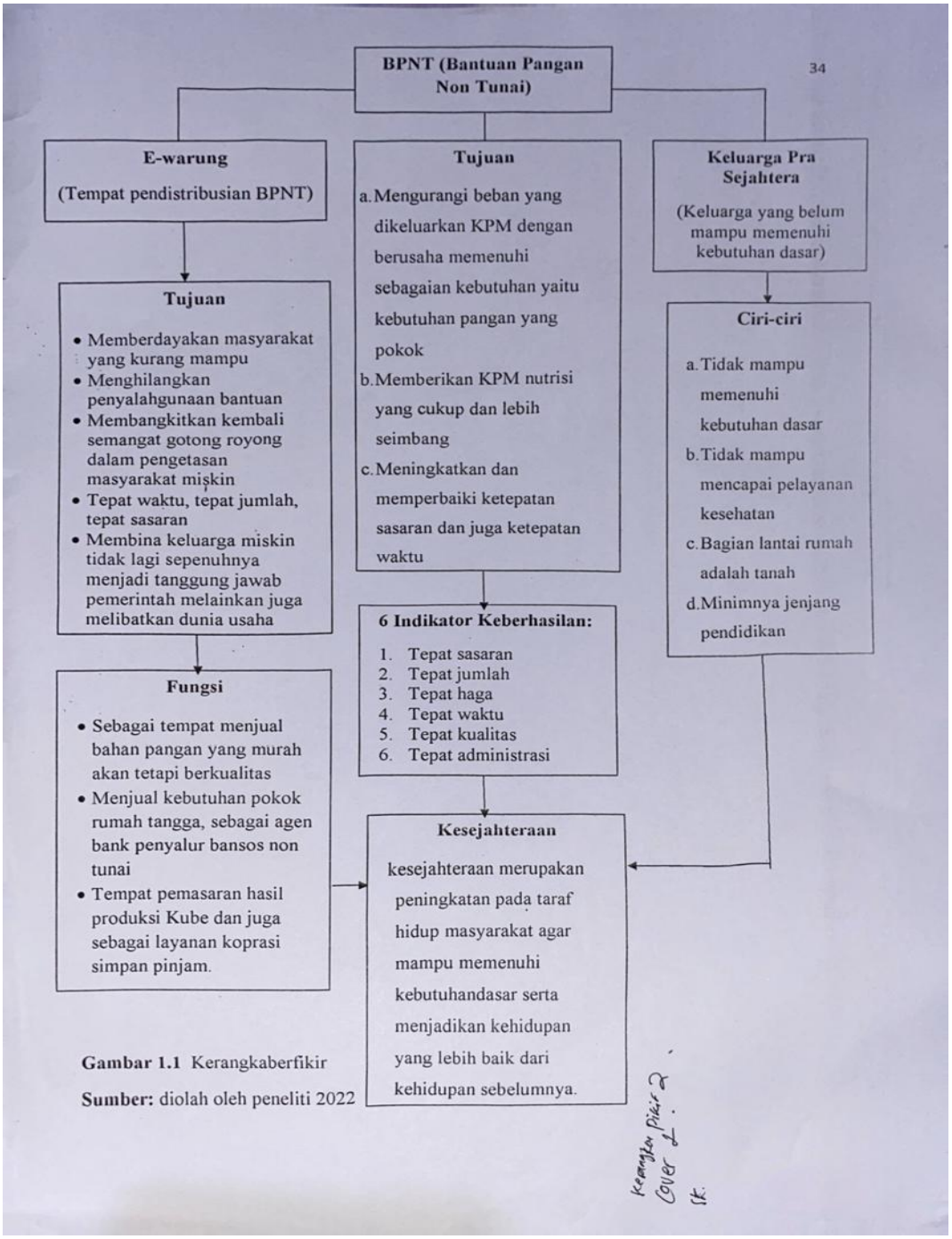

Gambar 1.1 Kerangkaberfikir

Sumber: diolah oleh peneliti 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif sebab penelitian ini akan memberikan informasi dengan penggambaran sederhana. Peneliti memilih menggunakan metode ini karena metode ini cocok untuk memberikan pemahaman tentang apa yang diteliti dengan cara memberi penjabaran dan penggambaran berupa keadaan yang ada bukan dengan mengukur dan menghitung. Menurut Sumanto (dalam Akhmad,2015) Deskriptif kualitatif ialah penelitian yang mengupayakan mendeskripsikan atau menggambarkan serta menginterpretasi kondisi yang ada saat ini, proses yang sedang berlangsung,akibat yang sedang terjadi ataupun kecenderungan yang sedang berkembang. Peneliti akan mencari informasi dan data untukpenelitian ini lalu menggambarkan secara faktual sesuai dengan relita yang ada. Untuk mendukung.

Menurur Arikunto (2005) yang dimaksud penelitian deskriptif kualitatif ialah penlitian yang mengumpulkan informasi tentang gejala yang ada, yaitu keadaan gejala sesuai dengan apayang ada pada saat penelitian itu dilakukan. Dijelaskan juga bahwa penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan apaadanya tentang suatu variable, keadaan maupun gejala.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memberikan berupa penjabaran kata bukan berupa pengukuran dan angka-angka. Sedangkan menurut Wahidmurni (2017) metode penelitian kualitatif dipilih untuk menjawab permasalahan penelitian yang kaitannya dengan data umum seperti narasi yang sumbernya dari kegiatan wawancara,observasi danpengamatan, serta pengalohan dokumen.

Metode deskriptif dairtikan sebagai metode yang upayanya mengintepretasikan serta menggambarkan objek sebagaimana adanya. Metode deskripif berusaha menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, dimana dan bagaimana (Syahril, 2020). Dalam Penelitian yang menggunakan metode deskriptif akan memberikan jawaban berupa gambaran pertanyaan– pertanyaan tersebut.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga yang menjadi keunikan dalam penelitian ini yaitu peneliti yang berperan sebagai instrument dan sekaligus sebagai pengumpul data. Berdasarkan Gumilang (2016) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data terhadap suatu latar alamiah bertujuan untuk menafsirkan fenoena atau kejadian dimana penelititi sebagai instrument kunci. Menurut Wahidmurni (2017) terdapat instrument lain berupa pedoman wawancara, angket,pedoman observasidan yang lainnya tetapi fungsi dari instrument-instrumen tersebut hanya sebagai pendukung sedangkan kehadiran peneliti sendiri merupakan instrument kunci dan mutlak. Hal ini disebabkan karena peneliti wajib berinteraksi dan terjun secara langsung dengan lingkungan yang ada dalam penelitian. Kehadiran peneliti juga sangat penting untuk penilaian keterlibatan peneliti dalamproses penelitian apakah peneliti selama ini aktif atau pasif.

Kehadiran peneliti digunakan sebagai instrumen utama dalam prosespenelitian memberikan keuntungan tersendiri diantaranya yaitu

1) Selaku instrument utama peneliti bisa masuk dalamlatar penelitian supaya dapat berhubngan secara langsung dengan informan serta dapatmemahamni secara alami realita yang terjadi di latar penelitian
2) Usaha peneliti untuk berinteraksi dengan informan secara wajar serta mampu menyikapi semua perubahan yang terjadi dilapangan, sehingga mampu menyusaikan diri dengan berbagai situasi.

3.3 Data Dan Sumber

A. Data Penelitian

Data penelitian kualitatif memiliki karakteristik tampilannya berbentuk kata-kata, data bisa berupa dokumen,catatatan, wawancara,kaset,rekaman, artefak (Bachri,2020). Data yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan yang akan di satukan dan susun sedemikian rupa sehingga mampu menjadi relevan dan sistematis. Data penelitian kualitatif adalah data kolaborasi dari hasil melihat, mendengar, menulis dan bertanya.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Manusia

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari berbagai sumber. Sumber data manusia yang utama yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Sungai Langka, sementara pihak E-Warong, RT,RW, kepala desa, serta kepala seksi kesejahteraan menjadi sumber pendukung dalam menggali informasi pada penelitian ini.

Tabel 1.3 Sumber Data Manusia

No.	Sumber Data	Kode	Jumlah
1.	Keluarga Penerima Manfaat	KPM	10
2.	Pihak E-Warung	PE	1
3.	Kepala Desa	KD	1
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa	KS	1
JUMLAH			13

Pemberian kode pada sumber data atau informan di harapkan mampu mempermudah pemahaman. Pemberian label ini sering disebut dengan coding. Dalam Junaid (2016) coding ialah proses mengkaji serta menelaah data yang masi mentah dengan cara memberikan label dalam bentuk kata,kalimat ataupun frase.

2. Sumber Data Non Manusia

Dalam penelitian ini data non manusia diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan juga data atau temuan yang diperoleh melalui pengamatan lapangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

A. Obseravasi

Menurut Riduwan (dalam Ayudia,2016) pengertian observasi teknik atau cara pengumpulan data dengan mengamati secara langsung ojek penelitian yang dituju guna melihat lebih jelas kegiatan dan aktivitas yang dilakukan. Melalui observasi peneliti dapat membuktikan berbagai presepsi yang telah diduga dengan fakta dan keadaanya yang relevan.

B. Wawancara

Slamet (dalam Edi,2016) mengartikan wawancara sebagai cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui interaksi sosial antar peneliti dengan orang yang diteliti atau pihak yang bersangkutan yang sering disebut dengan narasumber. Dengan wawancara peneliti bisa mendapatkan informasi dan data secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaa yang nantinya akan di jawab oleh narasumber. Wawancara sangat efektif untuk dilakukan karena jawaban dan informasi yang didapatkan dapat dijamin asli.

C. Dokumentrasi

Dikatakan Trimo (dalam Astuti,2010) Arti dokumentasi secara luas ialah produk suatu karya yang berasal dari kegiatan pengumpulan data, perekaman, dan pencatatan terhadap suatu peristiwa serta objek yang berkaitan dengannya, pengolahan dan penelusuran lebih dalam terhadap data,fakta, dan dokumen kepada orang yang memilki kepentingan diatasnya.

3.5 Uji Kredibilitas

Agar hasil penelitian tidak diragukan sebagai karya ilmiah di ranah akademik,maka sangat diperlukan Uji Kredibilitas.Teknik yang dilakukan dalam Uji Kredibilitas yaitu:

A. Memperpanjang waktu

Memperpanjang waktu dalam penelitian diharpkan mampu memperkuat hasil penelitian secara maksimal,peneliti bisa lebih teliti dengan mencocokan kembali informasi dan data yang didapatkan sehingga hasil

penelitian semakin baik. Dengan memperpanjang waktu peneliti juga bisa mendapatkan informasi dan mengumpulkan data lebih banyak sehingga hasil dari penelitian bisa semakin terpercaya dan juga lengkap.

B. Triangulasi

Triangulasi merupakan pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Triangulasi tidak bertujun mencari kebenaran akantetapi untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti terkait data dan juga fakta yang dimiki.Triangulasi adalah cara untuk mendapatkan data yang absah dengan cara dan teknik yang berbeda (Bachri,2010). Contohnya untuk mengecek suatu data peneliti dapat melakukan denganteknik wawancara, observasi, dan juga dokumentasi.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti cukup dengan data yang dikumpulkan, selanjutnya mengolah data dengan cara berikut ini:

A. Editing

Editing dilakukan ketika peneliti sudah mendapatkan cukup data lalu diperiksa, dicek dan di cocokan kembali guna mendapatkan keabsahandata atau validitas.Setelah editing dilakukan peneliti dapat membawa data yang telah disiapkan ketahap berikutnya.

Hastono (2001) menerangkan bahwa isian formulir ataupun kuesionerdalam editing harus melihat hal-hal berikut:

1) Lengkap, artinya semua pertanyaan- pertanyaan sudah terisi danterjawab
2) Jelas, tulisan jawaban dari pertanyaan cukup jelas untuk dipahami dan dibaca
3) Relevan, artinya jawaban yang diberikan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan
4) Konsisten, artinya pertanyaan dan jawaban selaras dan konsisten

B. Tabulating dan coding

Tabulating adalah penglompokan jawban yang sama dan seragam didalam tabel yang diberi kode. Memberikan kode bertujuan untuk mempermudah analisis dan pengolahan data pada tabel. Coding merupakan pengubahan data berbentuk huruf menjadi bentuk angka, misalnya laki-laki =1 dan perempuan =2

C. Intepretasi Data

Intepretasi data dilakukan dengan tujuan menggabungkan hasil analisis dengan penjabaran pada tabel sehingga mudah dipahamioleh peneliti maupun oleh pembaca.

3.7 Teknik Analisis Data

Neong Muhadjir (dalam Rijali, 2019) mengaretikan analisi data merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam mencari sekaligus menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, hasil wawancara, serta catatan lapangan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan siap menyajikan sebagai temuan untuk orang lain. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ialah:

A. Pengumpulan Data

Peneliti dapat mengumpulkan data dengan berbagai cara yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

B. Reduksi Data

Reduksi data ialah upaya atau usaha dalam menyimpulkan data,lalu dilakukan pemilahan data dalam konep tertentu, tema tertentu, serta kategori tertentu. Reduksi data bisa diartikan sebagai penyederhanan ataumeringkas hasil pengumpulan data Hasil dari reduksi data dibuat sedemikian rupa agar terlihat utuh dalam bentuk sketsa, sinopsis, matriksmaupun bentuk lainnya. Hal ini bisa mempermudah pemaparan serta penegasan kesimpulan.

C. Penyajian Data

Penyajian data ialah kegiatan atau aktivitas menyusun sekumpulan informasi, sehingga terdapat adanya kemungkinan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.Bentuk penyajian pada penelitian kualitatif berupa teks naraitif berupa cattatan lapangan, grafik, matriks, jaringan dan juga bagan.Bentuk- bentuk tersebut menggabungkan informasi yang telah tersusun dalam satu bentuk yang mudah dipahami sehingga bisa melihat dengan jelas fenomena yang sedang terjadi sehingga bisa menerka apakah kesimpulan sudah tepat atau harus melakukan analisis kembali.

D. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah upaya yang secara terusmenerus dilakukan oleh peneliti selama berada di lapangan. Awal penarikan kesimpulan memanglah beum jelas akan tetapi kemudian meningkat lebih rinci dan kokoh. Kesimpulan juga perlu diverifikasi sela proses penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali selama penulisan, melakukan tijauan ulang catatan lapangan, bertukar pikiran antar teman yang tujuannya mengembangkan kesepakatan intersubjektif, serta melakukan upaya-upaya secaraluas guna menempatkan salinan suatu temuan dalam data yang lain.

3.8 Tahapan Penelitian

Agar peneitian dapat berjalan secara efektif maka di butuhkan langkah-langkah penelitian yaitu:

A. Pengajuan Judul

Pengajuan Judul di lakukan setelah adanya diskusi bersama Pembimbing kademik yang membimbing dan memberikan masukan serta arahan terkait judul yang akan diajukann. Setelah mendapatkan arahan dari Pebimbing Akademik maka judul siap di ajukan ke ProgramStudi dan judul penelitain ini di setujui pada tanggal 12 Oktober 2021.

B. Penelitain Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan kondisi tempat penelitian secara sekilas yang diharpkan dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan situasi mengenaipermasalahn yang diangkat sehingga bisa menyusun kerangka untuk pembuatan proposal

C. Pengajuan Rencana Penelitian

Setelah melakukan konsultasi oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu terkait perbaikan Proposal Skkripsi maka pengajuan rencana penelitian bisa dilakuakan untuk bisa mengikutisemiar proposal. Ketika proposal dinyatakan layak untuk bisa melakukan penelitian maka peneliti bisa melanjutkan tketahap pembuatan pedoman penelitian

D. Penyusunan Kisi dan Pedoman Penelitian

Penyusunan kisi dan pedoman penelitian memilki tujuan untuk mempermudah proses pengumpulan informasi dari informan yangdilakukan oleh peneliti. Selain itu dijadikan pedoman dalam proses penelitian untuk mendpatkan informasi-informasi dan data yang dibutuhkan. Langkah-langkah yang perlu di lakukan peneliti dalam menyusun Kisi dan Pedoman peneliti yaitu menetukan tema, membuat daftar pertanyaan wawancara , serta membuat kisi-kisi observasi

E. Pelaksanaan Penelitian

Peneliti dipersilahkan untuk melakukan penelitian setelah memperoleh izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara, dan juga dokumentasi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dikaitkan dengan pembahasan mengenai teori-teori pendukung, maka dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Harapannya, bantuan ini dapat menjamin bahwa keluarga penerima tetap memiliki akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil atau saat terjadi krisis.

Melalui sistem non-tunai, pemerintah ingin mendorong penerima untuk lebih mandiri dan terlibat aktif dalam pemenuhan kebutuhannya, bukan sekadar menerima bantuan pasif seperti pada program-program sebelumnya. Dengan adanya kartu elektronik dan mekanisme pembelanjaan melalui warung resmi (e-Warong), penerima bantuan diberi keleluasaan untuk memilih barang yang dibutuhkan, sehingga bantuan menjadi lebih tepat guna dan tidak seragam. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga martabat mereka sebagai konsumen, bukan sekadar sebagai pihak yang diberi belas kasih.

Selain membantu individu dan rumah tangga miskin, BPNT diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal. Karena distribusi bantuan dilakukan melalui warung rakyat dan pemasok lokal, dana yang digelontorkan pemerintah tidak hanya berhenti di tangan penerima, tetapi juga berputar di masyarakat setempat dan memberi manfaat ekonomi yang lebih luas.

Impelemntasi program bantuan BPNT e-warung di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan berdasarkan indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat administrasi , sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum tepat sasara. Hal tersebut disebabkan karena data dari pusat seringkali sulit untuk dirubah.

Kuarngnya pemerataan tersebut seringkali menjadi pemicu adanya kecemuruan sosial antar warga. Peneliti menemukan beberapa KPM yang memiliki rumah berlantaikan keramik, datang mengambil bantuan menggunakan sepeda motor terbaru, bahkan menggunakan perhiasan yang mencolok. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa implementasi program BPNT E-warung teradap kesejahteraan keluarga pra-sejahtera di Desa Sungai Langka belum bisa dikatakan membantu dalam peningkatan, akan tetapi sudah sangat cukup membantu KPM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5.2 Saran

1. Untuk Peneliti Selanjutnya, Akademisi dan peneliti selanjutnya. dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah bahan referensi untuk penelitiannya, selain itu perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat diketahui program mana yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan dicari bentuk sinergi atau kombinasi diantaranya agar Implementasi program bantuan dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan lebih tinggi lagi.
2. Untuk Masyarakat Desa Sungai Langka, agar tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarganya namun masyarakat juga dapat berusaha dengan membuka usaha sendiri untuk lebih meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu juga ternyata masih ada masyarakat yang kurang kesadaran diri dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang sudah mampu masih menerima bantuan e-warong seharusnya masyarakat tersebut yang sudah

mampu harus memundurkan diri untuk digantikan dengan masyarakat yang lainya yang belum mendapatkan bantuan.

3. Untuk Pihak Pemerintah, Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Langka lebih baik lagi. Terutama kesejahteraan dibidang ekonomi, tempat tinggal dan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran Keluarga Penenrima Manfaat (KPM) tentang hak dan kewajiban KPM sesuai peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Alie, Faried. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung. Reflika Aditama Alimah, imal akmal.(2020). Implementasia Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Di Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.Universitas Muhammadiyah Makasar.

Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan media sosial bagi pengembangan pemasaran UMKM (Studi deskriptif kualitatif pada distro di KotaSurakarta). *Dutacom*, *9*(1), 43-43.

Arikunto. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Sagung Seto

Azwar, D. (2018). *Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-Warung Sebagai Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Studi Pada Kecamatan Tampan Pekanbaru)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Astuti, B. (2010). Dokumentasi Tari Tradisional. *Resital: Jurnal SeniPertunjukan (Journal of Performing Arts)*, *11*(1).

Ayudia, A., Suryanto, E., & Waluyo, B. (2017). Analisis kesalahan penggunaan bahasa indonesia dalam laporan hasil observasi pada siswa smp. *BASASTRA*, *4*(1), 34-49.

Azhari, I. (2015). Pengelompokan Golongan Ekonomi Masyarakat di Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah dengan Menggunakan Algoritma K-Means. Universitas Muhammadiyah Jember.

Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi padapenelitian kualitatif. *jurnal teknologi pendidikan*, *10*(1), 46-62.

Badrudin, Rudy(2012). *Ekonomi Otonomi Daerah.* Yogyakarta: UPP STIMYKPN.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *IndikatorKemiskinan*,(Online)tersediadi:*www.bkkbn.go.id/datadaninformasi/materi*

Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional, *Indikator Kemiskinan*. https://www.bkkbn.go.id/ diakses pada 08 januari 2022

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Indikator Kemiskinan*. https://www.bkkbn.go.id/ diakses pada 08 januari 2022.

Bantuan Sosial Menurut Peraturan Menteri Dalam Negreri Nomor 32Tahun 2011 Sebagai ManaTelah Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/Tulisan-Hukum Bansos.

Berita Resmi Statistik.No.86/09/Th.XVIII. Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2015. Presentase Penduduk Maret 2015 Mencapai 11,22 Persen. https://www.bappenas.go.id/files/data/Pengembangan_Regional_dan_Otonomi_Daerah/Statistik%2070%20Tahun%20Indonesia%20Merdeka.pdf

Dadu, F. D., & Sodik, M. A. (2021).Penyaluran Bantuan Dana Jaminan Sosialbagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.

Deny Soepulloh, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa (2017) Presepsi orang Tua Terhadap Anak Yang Tidak Melanjutkan Pendidikan Tingkat SMA. Jurnal Kultur Demokrasi. 5 (4)

Detik.com.(2019). Tiga Tahun Berjalan, Program Bantaun Pangan Non Tunai Dinilai Berhasil. https://news.detik.com/berita/d-4751176/tiga- tahun-berjalan-program-bantuan-pangan-nontunai-dinilai-berhasil diakses pada 22 Desember 2021

Dini, A. R., Nurmalisa, Y., & Halim, A. (2018).Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik. *Jurnal Kultur Demokrasi*, *5*(13).

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edi, F. R. S. (2016). *Teori wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio.

Eko Yudianto, Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Febra Anjar Kusuma. (2025). Penegakan Hukum Pada Kebijakan TAPERA Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik.(2)*

Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, *2*(2).

Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. Semarang: *Widya Karya*.

Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, *1*(3), 13-26.

Idtesis. (2007). Pengertian Keluarga Pra Sejahtera Menurut Para Ahli.WordPress.Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2022 pukul 18.00h.ttps://idtesis.com/pengertian-keluarga-pra-sejahtera-menurut/

Intan, I. S. (2022).Efektivitas Program E-warung Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi PadaDesa Sri Purnomo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).

Julianto, P. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sitinjau Laut Kabupaten Kerinci. *Qawwam: The Leader's Writing*, *1*(1), 38-43

Junaid, I. (2016). Analisis data kualitatif dalam penelitian pariwisata. *Jurnal Kepariwisataan*, *10*(1), 59-74

Kusuma, I. W. A., Pali, C., & David, L. (2015). Perbedaan Kebahagian Pada Keluarga Prasejahtera Dan Sejahtera Di Desa Mopuya Utara Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. *eBiomedik*, *3*(2).

Latif, Y., & Ibrahim, I. S. (2011). Negara Paripurna: Historisitas. *Rasionalitas,dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.

MA'ARIF, A. I. (2018).Pengaruh Bantuan Sosial Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kecamatan Grorol Kota Cilegon Banten (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" SMH"Banten).

Maipita, Indra. (2014). *Mengukur Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan. Yogyakarta*.UPP STIM YKPN

Nawawi, Ismail. (2009). *Public policy:* Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan . Jakarta. Elek Media Komputindo.

Nugraha, A. (2019). *Pemberdayaan Anak Dari Keluarga Pra Sejahtera Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Atau Panti Asuhan Al-Hijrah Duyu Kota Palu* (Doctoral dissertation, IAIN Palu).

Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*: Jakarta. Elek Media Komputindo

Peraturan mentri sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016.**https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130008/permensos-no-25-tahun-2016.** diakses pada 29 Desember 2021

Putri, Dita Rizky Anindy. (2021). Efektivitas Pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Oleh Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Bima (Studi Kasus Kecamatan Raba).Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal IlmuDakwah, 17*(33), 81-95.

Rochaida, Eny. "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur." *Forum* 4 *Ekonomi*. Vol. 18. No. 1. (2016).

Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Managemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan, 5*(02), 173- 190.

Rosaliana, A & Hardjati, S. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research, 1*(2), 96-111.

Septiani, D., Nurmalisa, Y., & Halim, A. (2019). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Dalam Membantu Kemandirian Dan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Kultur Demokrasi, 5*(1).

Subarsono,(2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :PustakaPelajar

Suprajitno. (2004). Asuhan Keperaatan Keluarga: Aplikasi Dalam Praktik. Kedokteran ECC. Jakarta

Suwitri, S. (2008) . *Konsep dasar kebijakan publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Susanti, S. (2016).Implementasi Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

Syahida, B. A. IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TANJUNGPINANG.

Syahril Iskandar, M. (2020). Metode Deskriptif.

Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal IlmuDakwah, 17*(33), 81-95.

Taufiqo, F. U. K. (2018). Dampak Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah TanggaAnalisis Sistem Neraca Sosial ekonomi Indonesia. *Journal of Economics Development Issues, 1*(2), 26- 32.

Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif. Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Wardani, F. K. (2021). *Efektivitas Program BPNT di Dusun Ketalo Bantul*. Jurnal Riset Daerah, Bantul.

Yunus, Eko Yulianto. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Keamatan Kaniaga Kota Probolinggo.*Jurnal Reformasi.* Vol 9(2)

Zaman, Nur, et al. (2021)*Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yayasan Kita Menulis.